

Konflik Komunal: Maluku 1999-2000

Oleh:

Jamin Safi, M.Pd

Pendidikan Sejarah STKIP Kie Raha Ternate

E-mail: jasminsayafi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konflik Ambon, pergolakan politik di Maluku Utara hingga konflik etnis dan agama 1999-2000. Penelitian ini menggunakan metode sejarah. Penelitian sejarah meliputi lima tahapan yaitu pemilihan topik, heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Konflik yang terjadi sejak tanggal 19 Januari 1999 Maluku merupakan peristiwa berdarah yang bertepatan dengan umat Muslim merayakan Hari Raya Idul Fitri 1419 Hijriah. Konflik bermula dari pertikaian antara sopir angkot, Jacob Lauhery yang beragama Kristen dengan Nursalim, seorang Islam dari Batu Merah keturunan Bugis. Konflik kemudian berkembang menjadi konflik agama (Islam dan Kristen). Di Maluku Utara konflik juga terjadi, pergolakan politik ditingkat lokal, Maluku Utara menimbulkan polarisasi di masyarakat hingga konflik etnis dan agama. Konflik Maluku Utara juga bagian dari perebutan kekuasaan. Faktor lain adalah pembentukan kecamatan baru Makian Malifut berdasarkan PP. No.42/1999 telah mendapat penolakan dari masyarakat Kao karena dianggap bertentangan dengan hukum adat. Peristiwa tersebut menyebar sampai ke Tidore, Ternate, Jailolo dan Bacan. Konflik Maluku Utara menelan korban ribuan jiwa, rumah dan tempat-tempat ibadah baik umat Islam maupun Kristen hangus terbakar. Selama berlangsungnya konflik, *Pela Gandong* di Ambon, Maluku dan *adat se atorang* di Maluku Kie Raha sebagai sistem adat dan budaya tidak lagi berfungsi sebagai ikatan sosial yang kuat.

Kata Kunci: *Konflik, Komunal, Maluku, Etnis*

Abstract

*This study aims to explain the conflict Ambon, political upheaval in North Maluku to ethnic and religious conflicts 1999-2000. This study uses historical method. Historical research includes five stages: topic selection, heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The conflict that occurred since 19 January 1999 Maluku is a bloody event that coincides with Muslims celebrating the Eid al-Fitr 1419 Hijri. The conflict stems from a dispute between an angkot driver, a Christian Jacob Lauhery with Nursalim, an Islam of the Bugis Red Stone. Conflict then developed into religious conflict (Islam and Christian). In North Maluku conflicts also occur, local political upheaval, North Maluku causing polarization in society to ethnic and religious conflicts. The North Maluku conflict is also part of a power struggle. Another factor is the creation of a new sub-district of Makian Malifut based on PP. No.42 / 1999 has been rejected by the Kao community because it is considered contrary to customary law. The event spread to Tidore, Ternate, Jailolo and Bacan. The North Maluku conflict claimed thousands of lives, homes and places of worship, both Muslims and Christians burned. During the conflict, *Pela Gandong* in Ambon, Maluku and indigenous people in Maluku Kie Raha as a customary and cultural system no longer functions as a strong social bond.*

Keywords: *Conflict, Communal, Maluku, Ethnicity*

Pendahuluan

Maluku merupakan wilayah kerajaan yang dikenal dengan penghasil rempah-rempah terbesar di dunia seperti cengke dan pala. Sebagai daerah penghasil rempah terbesar, banyak pedagang-pedagang Eropa, Arab dan lainnya mulai berdatangan. Kehadiran pedagang-pedagang tersebut mulai mempengaruhi kehidupan pribumi seperti Ternate, Makian, Bacan, Moti, Tidore dan Jailolo baik dalam aspek ekonomi, sosial maupun budaya. Kedatangan orang-orang eropa, awalnya di sambut dengan baik oleh pribumi. Namun praktek monopoli perdagangan telah menimbulkan perlawanan seperti perlawanan Sulatan Babullah, Sultan Nuku, dan Pattimura. Di Indonesia, konflik dan kekerasan sudah pernah terjadi sejak zaman kolonial, revolusi, Orde Lama dan Orde Baru. Konflik dan kekerasan juga pernah terjadi di Aceh, Sulawesi, Papua dan Maluku hingga Maluku Utara. Kekerasan sebenarnya berakar dari dalam tradisi politik kerajaan-kerajaan dan juga di dalam masyarakat Indonesia itu sendiri. Masalahnya adalah didalam cara bagaimana kekerasan itu di praktekkan dan untuk tujuan apa. Kekerasan yang terjadi di Maluku Utara adalah bagian dari pertarungan elit politik lokal dalam merebut kekuasaan (Erman, 2002:vi).

Pada Rezim Orde baru, Maluku merupakan salah satu wilayah yang kurang diperhatikan sehingga terjadinya kesenjangan sosial dan ekonomi. Setelah Orde Baru, Baharudin Jusuf Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri, Maluku dan Maluku Utara menjadi fokus pemerintah Indonesia diantaranya masalah kepentingan elit lokal, konflik etnis dan agama. Konflik yang dimulai sejak 1999 mengejutkan banyak pihak baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Konflik pecah mulai dari antar etnis kemudian berkembang menjadi konflik agama Islam dan Kristen. Awalnya kepulauan ini merupakan daerah aman yang dikat dengan sistem adat

budaya seperti *Pela Gandong* di Ambon dan *adat se atorang* di Maluku Utara—Maluku Kie Raha yang merupakan empat negara tradisional antara lain Bacan, Jailolo, Tidore dan Ternate, tidak lagi berfungsi sebagai kekuatan di masa itu.

Ambiguitas peran Islam dalam bangsa Indonesia dan hubungan patrimonial yang mendukung Orde Baru telah mempertegas perpecahan di antara orang-orang Kristen dan Islam. Kebijakan-kebijakan rezim dan penggunaan manipulatif agama untuk dukungan politik memiliki konsekuensi negatif, khususnya karena kebijakan kolonial Belanda telah menciptakan perpecahan di antara komunitas-komunitas agama (Bertrand, 2012: 185-186). Kasus Ambon dan Maluku Utara adalah kasus pengungsi akibat ulah manusia. Pada mulanya dalam bentuk konflik sederhana yang menimbulkan kerusuhan terbatas, kemudian berlanjut menjadi kerusuhan sporadis dengan melibatkan kelompok etnis tertentu dan akhirnya menjadi pertikaian antar agama Islam dan Kristen (Abdulrahman, 2002: 97). Atas dasar uraian tersebut di atas, maka tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan konflik Ambon, pergolakan politik di Maluku Utara hingga konflik etnis dan agama 1999-2000.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah menggunakan metode sejarah melalui studi pustaka. Metode sejarah adalah kegiatan mengumpulkan sumber-sumber sejarah, menilai secara kritis, dan hubungkan dengan menggunakan langkah-langkah dalam metode sajarah. Menurut Gottschalk (1985:39) metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Untuk menghasilkan tulisan sejarah yang ilmiah maka mengikuti metode penelitian sejarah. Penelitian sejarah di tempuh melalui lima tahapan, yaitu (1) pemilihan topik, (2) heuristik, (3) kritik, (4)

interpretasi, dan (4) historiografi (Kuntowijoyo, 2013:69).

Dalam penelitian ini mengikuti prosedur dalam metode sejarah. Langkah pertama adalah pemilihan topik, topik yang diangkan dalam tulisan ini adalah Konflik Komunal: Maluku 1999-2000. Langkah kedua adalah heuristik, yaitu mengumpulkan sumber pustaka berupa buku, arsip dan dokumen yang berhubungan dengan konflik Maluku 1999-2000. Setelah pengumpulan sumber, dilanjutkan dengan langkah ketiga yaitu kritik sumber. Kritik sumber dilakukan dengan cara verifikasi data/sumber sejarah yang diperoleh. Kritik meliputi kritik eksternal yaitu dilakukan untuk mengetahui keaslian data, sedangkan kritik internal lebih menekankan pada aspek isi sumber. Kritik ini internal dilakukan untuk mengetahui kebenaran data sejarah. Langkah keempat adalah interpretasi, yaitu penafsiran serta menghubungkan fakta-fakta sejarah fakta-fakta sejarah. langkah terakhir dalam metode sejarah adalah historiografi. Tahapan historiografi yaitu kegiatan menyusun fakta-fakta sejarah menjadi suatu kisah dalam bentuk tulisan sejarah.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sejak awal, kepulauan Maluku didiami oleh dua suku asli, yaitu suku Alune dan Suku Wemale. Dari dua suku asli tersebut, kemudian beranakpinak melahirkan sejumlah suku-suku lainnya, seperti suku Alifuru, Togitil, Furu Aru, Ternate, Seram, Buru, Takabu, Tobelo, Banda, Rana, dan Moa. Keragaman suku-suku itulah kemudian muncul istilah Maluku. Sedikitnya, pada waktu itu, terdapat 41 sub etnis yang mendiami kepulauan Maluku (Suaedy dkk, 2000:13). Kehidupan di Maluku sebelum konflik 1999 bukanlah hal yang tidak mungkin. Orang-orang Islam dan Kristen, Hidup berdampingan antara Islam dan Kristen sudah lama terjalin tanpa gesekan yang berarti. Disisi lain, kebersamaan tersebut juga diperkuat dengan adanya sistem *pela*

yang berfungsi sebagai ikatan sosial dalam kehidupan mereka baik antar agama, suku, dan saudara.

Meletusnya Konflik di Ambon, Maluku

Dalam panggung sejarah, Maluku selalu diwarnai dengan konflik yang bernuansa SARA. Migrasi orang Buton, Bugis Makassar (BBM) yang semakin meningkat di Ambon dan wilayah Maluku lainnya menimbulkan persaingan dagang dengan penduduk pribumi. Persaingan dagang antara pendatang dan orang Ambon bermuara pada kesenjangan sosial dan ekonomi. Pada tanggal 19 Januari 1999 bertepatan dengan umat Islam merayakan Hari Raya Idul Fitri 1419 Hijriah, “hari kemenangan”. Bagi umat Islam, “hari kemenangan” adalah manusia kembali suci setelah melaksanakan ibadah puasa selama satu bulan. Tradisi perayaan hari raya Idul fitri adalah umat Islam biasanya merayakan hari tersebut dengan saling maaf dan memaafkan antara satu dengan yang lainnya. Namun kenyataannya situasi berubah menjadi tragedi berdarah.

Insiden awal dari pertikaian yang terjadi bukan tidak pernah terjadi sebelumnya. Orang-orang Ambon setempat ingat soal meletusnya kekerasan yang kerap terjadi antara penduduk Kristen Mardika dan Batu Merah yang sebagian besar Muslim (Bertrand, 2012: 201). Pertikaian yang terjadi antara sopir angkot yang beragama Kristen dengan seorang pemuda keturunan Bugis yang beragama Islam di Batu Merah berkembang menjadi konflik Agama (Islam dan Kristen. Informasi mengenai konflik tersebut berbeda-beda. Menurut *The Human Right Watch Report, March 1999* (Triyono, 2001: 39-40) bahwa terdapat dua versi penyebab konflik Maluku 1999, antara lain, *pertama* versi Tim Pengacara Gereja yang dianut oleh kebanyakan warga komunitas Kristen dan *kedua* versi Tim Pencari Fakta Muslim Ambon. Menurut versi pertama, Tim Pengacara Gereja yang dianut oleh kebanyakan warga komunitas Kristen bahwa:

“Seorang sopir angkutan kota beragama Kristen, Jacob Lauhery atau dikenal sehari-hari dengan nama Yopi, menjadi korban penodongan dan penganiayaan dua pemuda Muslim keturunan Bugis, salah satunya bernama Nursalim. Menurut versi ini, Yopi yang ketika dengan kendaraan angkotnya baru saja tiba di terminal Batu Merah didekati Salim dengan meminta uang Rp. 500. Yopi menolak permintaan itu sambil mengatakan tidak punya uang karena baru saja menarik angkotnya. Kemudian Yopi menjalankan mobilnya ke terminal Mardika mencari penumpang. Setengah jam kemudian, Yopi kembali ke terminal Batu Merah masih dengan tanpa penumpang. Salim kembali mendekati Yopi meminta uang dan lagi Yopi menolaknya karena tidak membawa uang. Menurut versi ini, Yopi meminta pemuda tersebut untuk menghentikan perbuatannya. Sebagai reaksi balik, Salim mengancam mengeluarkan pisau dari balik bajunya dan mengarahkannya ke leher Yopi. Yopi melawan dan mendorong pemuda tersebut sambil menutup mobil dan lari ke kampung Mardika. Hal tersebut berlangsung dua kali, ketika Yopi kembali ke terminal Batu Merah, Salim masih disana kembali menodongkan pisaunya. Yopi kemudian lari pulang kerumahnya mengambil pisau badik diikuti oleh teman-temannya dari kampung Mardika untuk mencari Salim. Namun Salim sudah tidak ada disana. Yopi dan teman-temannya akhirnya kembali pulang. Namun 15 menit kemudian, ratusan pemuda Muslim dari Batu Merah datang ke rumah Yopi, namun tidak menemukan Yopi dan kemudian menyerang warga kampung Mardika di sekitarnya”.

Sedangkan versi kedua adalah versi Tim Pencari Fakta Muslim Ambon, mengatakan bahwa konflik 1999 diawali:

“Seorang Pemuda Muslim dari Batu Merah sebagai korban penganiayaan yang dilakukan Yopi. Pemuda Muslim tersebut bekerja sebagai kenek angkutan kota yang dikemudiakan oleh sopir yang bernama Yopi. Menurut versi ini, Yopi sebenarnya adalah sopir kendaraan angkutan kota milik warga keturunan Bugis di Batu Merah. Sebelum kejadian itu, Yopi telah menggunakan mobil itu untuk keperluan pribadi dengan menyewakan kepada orang lain. Kemudian, atas nama pemiliknya si kenek pemuda Muslim itu menanyakan kepada Yopi uang sewa mobil itu. Yopi menolak permintaan itu dan mengancam kenek untuk tidak mengungkit-ungkitnya. Pertengkaran mulut terjadi antara kedua pemuda itu. Beberapa penumpang Kristen di dalam mobil membela Yopi dengan memaki-maki si kenek pemuda Muslim. Kemudian si kenek itu lari ke Batu Merah meminta bantuan pada temannya karena di ancam Yopi. Akhirnya, kedua kelompok pemuda itu bentrok dan menimbulkan pertikaian massa di antara mereka”.

Kerusuhan di Maluku merupakan konspirasi RMS untuk mewujudkan sebuah negara Kristen yang berdaulat sebagai pengejawantahan dari gerakan Oikumene yang dibangun kolonial Belanda pada permulaan abad XX. Perwujudan Negara Kristen di Maluku merupakan tindak lanjut dari pernyataan Gereja Kristen dalam sebuah Sinode pada tanggal 6 September 1936 (Gereja Protestan Maluku). Terjadinya Idul Fitri berdarah tanggal 19 Januari 1999 bagi umat Kristen dan pemerintah RMS serta tokoh Gereja menjadi sebuah catatan khusus untuk menyusun kekuatan sehingga memasuki

milennium baru dapat menjadi realisasi cita-cita Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Frederik William Inderburg, melalui Kristening politik untuk membangun negara Kristen Maluku yang merdeka berdasarkan ajaran Kristen (Husni Putuhena dalam Waileruny, 2010:152). Konflik agama Islam dan Kristen yang terjadi adalah peristiwa “gelap berdarah” dalam sejarah Maluku. Kekejian setingkat itu belum pernah terjadi sebelumnya di Ambon, bahkan selama masa penindasan oleh pasukan Indonesia terhadap pemberontak daerah yang dikenal dengan nama RMS (Republik Maluku Selatan) hampir setengah abad yang lalu. Tetapi pengamatan yang lebih seksama mengungkapkan bahwa gugutan yang diwarnai kekerasan tidak muncul begitu saja tanpa alasan sama sekali. Unsur kontekstual terpenting di Ambon adalah tingkat penetrasi oleh negara ke dalam masyarakat yang sangat tinggi bahkan menurut standar Indonesia. Pemerintahan modern membenteng memasuki bagian timur Nusantara dengan intensitas yang semakin meningkat sepanjang abad ke-20. Ambon adalah basis bagi penjajahan birokratis seperti ini. Tumbuhnya pemerintahan membentuk sejarah kota itu (Chauvel dalam Klinken, 2007:150-151).

Pada tanggal 24 Juli 1999 konflik bermula di negeri Poka dalam bilangan Kotamadya Ambon yang segera menjalar kedalam kota Ambon. Pada hari pertama itu seluruh pusat ekonomi (kebanyakan Cina) di Jalan A.J. Patty dibakar habis sehingga para pengusaha Cina eksodus dari Ambon. Wilayah Kristen dan wilayah Islam. Kota Ambon terbagi dua: wilayah Kristen dan wilayah Islam. Konflik juga melanda pulau Seram. Pada tanggal 18 dan 19 Agustus sejumlah negeri Islam menyerang negeri Piru yang sebagian besar berpenghuni Kristen. Konflik itu berulang kembali tanggal 2 Desember. Menyusul konflik di Kairatu (Seram Barat) pada tanggal 19 September (Leirissa, 2001: 37-38).

Konflik masih berlangsung sampai pada tanggal 26 Desember 1999. Konflik tersebut berawal ketika gereja Silo di kota Ambon dibakar masyarakat tanpa ada pencegahan yang berarti dari aparat keamanan (Leirissa, 2001: 38). Bantuan militer kepada pihak Muslim. Bagaimana pun tidak signifikan dalam mengalihkan keseimbangan strategi kepada umat Muslim. Peristiwa perusakan gereja Silo hanya sejauh 300 meter dari masjid Al Fatah, dan para tentara tampak menunjukkan keberpihakan mereka. Perusakan gereja Silo itu merupakan pukulan yang simbolis bagi umat Kristen. Namun orang-orang Muslim tetap terperangkap di daerah kumuh yang sempit didekat pelabuhan kota. Atas kerusakan gereja Silo itu orang-orang Kristen membalas dengan cara membakar masjid terdekat yaitu masjid An-Nur. Baru setelah Laskar Jihad dari Jawa tiba pada Mei 2000, keseimbangan strategi Muslim mendekati sejajar dengan pihak Kristen. Orang-orang Kristen memaparkan kedatangan Laskar Jihad sebagai eskalasi perang yang serius, namun orang-orang Muslim sering menyambut mereka karena mereka menjanjikan keamanan (Klinken, 2007: 173).

Beberapa pengamat di Jakarta memperkirakan, tidak siapnya aparat keamanan dalam menangani kerusakan di Ambon akibat adanya “perang” antara kelompok sendiri di tubuh militer. Di satu sisi ada kelompok militer yang dikenal sebagai militer hijau, yang disebut-sebut dekat dengan kelompok Islam, disisi lain, ada kelompok yang dikenal sebagai militer nasionalis, dan dikenal dekat dengan kelompok pelangi, sebutan untuk gabungan kelompok “berwarna” (Suaedy, dkk. 2000: 69). Ada persepsi bahwa pihak TNI/POLRI terlibat, atau minimal tidak netral, dalam konflik Maluku telah berkembang cukup luas di masyarakat. Bahkan, ketidakpercayaan komunitas Maluku terhadap TNI/POLRI dalam mengatasi konflik Maluku boleh dikatakan demikian sangat besar. Telah berkembang

sikap menolak TNI, khususnya terdapat Angkatan Darat (AD). Sementara dipihak Muslim berkembang sikap anti POLRI. Persepsi demikian itu berkembang tidak terlepas dari kenyataan bagaimana peran dan kinerja TNI/POLRI selama dalam menangani konflik yang berkembang di lapangan (Trijono (2001: 105).

Ketua Sinode Gereja Protestan Maluku berpendapat, “Agama punya otoritas dan punya entitas yang independen yang harus dimuarakan pada kepentingannya yang paling penting yakni kepentingan etnik. Menurutnya, “Fakta menyatakan konflik Maluku bukan konflik agama, karena bila itu konflik agama, maka itu jauh lebih buruk. Sebab dalam konflik, proses Islam-Kristen tetap jalan, kalau konflik agama tidak mungkin begitu. Ada banyak orang Islam yang menyelamatkan orang Kristen dan sebaliknya dalam konflik” (Waileruny, 2010: 200).

Di Maluku tidak terdapat suatu lembaga politik yang menyatukan keseluruhan wilayah itu dalam suatu bentuk geo-politik, seperti di Maluku Utara dimana sejak abad ke-16 telah muncul kerajaan-kerajaan di Ternate, Tidore, dan Bacan (kerajaan ke-4 adalah Jailolo di Halmahera lenyap dalam abad ke-17). Struktur politik yang menyatukan negeri-negeri di Maluku, baik Islam maupun Kristen, adalah birorasi Belanda sejak zaman VOC di abad ke-17. Dalam masa VOC di kota Ambon terdapat seorang *Gouverneur*, dan dibawahnya terdapat *Resident* yang masing ditempatkan di Hila (untuk jazirah Hitu, Buru dan Seram Barat seitar Piru dan Hoamoal, di Haruku yang mencakup pulau Haruku dan Seram Barat sekitar Kairatu, dan di Saparua yang mencakup Nusalaut dan Seram Timur sejak dari Amahai. Gubernur dan para Residen itu diperkuat dengan benteng-benteng (Leirissa, 2001: 41-42). Namun orang-orang Maluku di Ambon dan pulau-pulau sekitarnya dikenal dengan budaya *Pela Gandong*. Budaya tersebut sebagai

institusi sosial yang berfungsi untuk mengikat perbedaan agama maupun etnis.

Pela adalah ikatan hubungan antara dua atau lebih desa atau negeri Salam dan Sarani berdasarkan ikatan perjanjian kontrak untuk tidak berkonflik satu sama lain. *Gandong* adalah ikatan sosial antar negeri atau desa berdasarkan huubungan darah atau keturunan. *Gandong* sendiri berarti kandungan, ikatan hubungan antar anak negeri berdasarkan hubungan saudara satu keturunan atau satu kandungan ibu yang sama (Ziwar Effendi dalam Trijono, 2001: 25). Peristiwa berdarah sejak Januari 1999 di Maluku, *Pela Gandong* sebagai warisan para leluhur yang berfungsi sebagai ikatan sosial sudah tidak efektif.

Pertarungan Elit Lokal di Maluku Utara

Setelah runtuhnya rezim Orde Baru, perebutan kekuasaan mulai terjadi secara serentak di berbagai daerah-daerah salah satu di antaranya adalah di Wilayah Maluku Utara. Dimana wilayah ini sebelumnya berada di bawah provinsi Maluku yang ibu kotannya di Ambon.

Dalam sebuah konferensi untuk memberikan input bagi menteri dalam negeri di Jakarta dalam rangka sidang MPR mendatang, aktivis HMI setempat, Syaiful Bachri Ruray, mengusulkan pentingnya pembentukan provinsi baru dengan nama provinsi Maluku Uatara. Di balik layar, ide tersebut sebenarnya merupakan pemikiran Bupati Halmahera, Bahar Andili. Usulan tersebut akhirnya membakar imajinasi semua dan memicu gelombang nasionalisme dan persatuan lokal (Klinken, 2007: 186). Sebelum Habibi kehilangan kursi kepresidenannya, dia menandatangani sebuah undang-undang yang menyatakan bahwa Maluku Utara menjadi provinsi baru (UU 46/1999, 4 Oktober 1999). Undang-undang itu mempertimbangkan berbagai kepentingan kelompok elit Maluku Utara. Saat itu para elit tersebut mulai tarik-menarik menuju dua kubu, yang satu disepetar sultan Ternate dan sebagian lagi mengitari mereka yang menentanginya. Provinsi itu

dinamakan Maluku Utara bukan nama yang terdengar terlalu tradisional—Maluku Kie Raha seperti yang dikehendaki sultan (Klinken, 2007: 188).

Upaya untuk mendapat dukungan dari Pemerintah Pusat oleh kedua belah pihak semakin gencar, dalam menuju kandidat Gubernur Maluku Utara. Pihak Pemerintah kecuali dewan adat didukung sepenuhnya oleh rakyat Maluku Utara, tokoh dalam pihak ini antara lain adalah Bahar Andili, Abdullah Assagaf, Thaib Armayn, dan elit lokal lainnya termasuk Sultan Tidore. Sedangkan sultan Ternate hanya mendapat dukungan dari dewan adat Ternate, Jailolo dan Kao (Nur, 2009: 60). Etnik Makian memegang banyak jabatan eksekutif puncak di daerah Maluku bagian utara. Selain itu, Bupati Bahar Andili dari Halmahera Tengah, Adiknya Syamsir Andili memimpin kota Ternate, yang telah di sempalkan dari Maluku Utara sebagai kabupaten ketiga menjelang akhir Orde Baru. Kesuksesan mereka bukan adalah bukanlah berkat koneksi-koneksi aristokratik dengan kesultanan, melainkan berkat kerja keras dan sikap saling membantu. Banyak diantara para mahasiswa yang bermotivasi tinggi di Universitas Khairun dan STAIN Ternate dan juga orang Makian (Klinken, 2007: 193). Pergolakan politik ditingkat lokal menimbulkan suasana yang tidak stabil di masyarakat. Dominasi orang Makian dalam pemerintahan menjadikan posisi mereka semakin kuat untuk menjadikan Maluku Utara sebagai provinsi baru. Sedangkan sultan Ternate yang menghendaki provinsi Maluku Kie Raha tidak tercapai. Penetapan Maluku Utara sebagai provinsi Maluku Utara adalah tanda kekalahan sultan Ternate dalam merebut jabatan gubernur.

Pada Desember 1998, Mudaffar Syah mencalonkan dirinya sebagai ketua Golkar cabang Maluku Utara. Ternyata rapat itu memilih calon lain (Abdul Kahar Limatahu), namun ‘para penjaga istana’ yang militan dan loyal terhadap sultan telah mengelilingi gedung itu dan dengan

tegas berseru agar keputusan itu diubah (Streit dalam Klinken, 2007: 194). Pada pertengahan Mei 1999 daftar calon sementara Golkar muncul untuk pemilihan tingkat kabupaten, semua rival Mudaffar sudah tersingkir. Yang paling utama dari semua rival-rival yang tersingkir adalah Syaiful Bahri Ruray, seorang Makian dan pahlawan bagi Mahasiswa Universitas Khairun. Mahasiswa kemudian berdemonstrasi secara terbuka menentang sultan, misalnya ketika dia berkunjung ke Pulau Kayoa (Klinken, 2007: 194-195).

Selain mengetuai Golkar Cabang Maluku Utara dan menjadi dewan di tingkat kabupaten, sultan juga punya kartu rahasia—yakni kekuatan fisik. Generasi Muda Sultan Babullah (Gemusba), menggambarkan dirinya sebagai “pengamanan tradisional kraton” dan mengklaim aura budaya yang mengelilingi sultan dalam tema mapan. Gemusba adalah salah satu sarana untuk memobilisasi dukungan bagi sultan dalam masyarakat. Para pemimpinnya menggambarkan budaya desa asal dari para anggota Gemusba sebagai masyarakat yang fanatik setia padanya. Desa-desa ini terletak di wilayah geografis yang masuk “kerajaannya”nya—tempat-tempat seperti Pulau Hiri di ujung barat daya Ternate, Kao dan Tobelo yang keduanya terletak di Halmahera (yang terakhir ini kebanyakan Kristen). Kenyataannya Gemusba bukanlah organisasi adat yang muncul dari akar rumput. Gemusba punya hubungan yang solit dengan Golkar dan Militer (Klinken, 2007: 195)

Pertarungan elit lokal untuk membentuk provinsi baru telah menimbulkan polarisasi di Maluku Utara. Keinginan sultan Ternate, Mudaffar Syah membentuk provinsi baru dengan nama provinsi Maluku Kie Raha sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah empat kerajaan di Maluku yaitu Ternate, Tidore, Bacan dan Jailolo. Sedangkan kelompok yang menghendaki provinsi Maluku Utara mendapat dukungan pemerintah dan masyarakat Maluku Utara. Pertarungan

merebut kursi kekuasaan (Gubernur) yang penuh dengan kekacauan itu, akhirnya pada bulan Oktober 2002 jabatan gubernur Maluku Utara jatuh ke Thaib Armayn.

Dari Konflik Etnik Hingga Agama

Pada tanggal 24 Juni pemerintah di Jakarta, atas permintaan Bupati Maluku Utara, mengeluarkan sebuah peraturan, yang dikenal dengan PP. No.42/1999 tentang pembentukan dan penataan kecamatan baru Makian Malifut. Beberapa tim pemerintah kabupaten dikirim untuk “mensosialisasikan” hal ini ke desa-desa Kao yang terkait. Orang-orang Kao yang merasa dilangkahi, menerima dengan sikap bermusuhan. Masyarakat mahasiswa etnik Kayoa di Ternate pada gilirannya menanggapi tantangan tersebut. Mereka mengancam orang-orang Kao melalui sebuah stasiun radio lokal: “Siapa pun yang hendak coba-coba menghalangi PP. No.42/1999 harus berhadapan dengan para mahasiswa Makayoa” (Hulaleng dalam Klinken, 2007: 198).

Penolakan masyarakat Kao terhadap rencana pembentukan wilayah Malifut menjadi kecamatan Makian Daratan didasarkan pada pranata sosial, aturan dan mekanisme adat setempat yang sudah ada sejak zaman kesultanan dan Belanda. Bagi masyarakat suku di Halmahera, batas wilayah kesukuan telah diatur dan disepakati bersama sejak zaman kesultanan. Pelanggaran terhadap wilayah kesukuan merupakan pelanggaran terhadap adat yang harus dibayar mahal dengan darah, dan sebagai pemerintah daerah Maluku Utara harusnya memahami kondisi tersebut. Aspirasi itu tidak diakomodir oleh pemerintah setempat yang memang saat itu didominasi oleh kelompok-kelompok suku Makian, Tidore, dan Kayoa yang notabene mempunyai *interest* tertentu terhadap potensi sumber daya alam di wilayah Malifut yang mengandung tambang emas. Bahkan sejarah telah mencatat bahwa ketiga etnik tersebut di atas selalu bergabung membentuk suatu kelompok elit di bawah hegemoni

Kesultanan Tidore yang secara laten bersaing dengan hegemoni kesultanan Ternate (Jan Nanere dalam Totona, 2014).

Motif lokal dalam konflik Maluku Utara antara lain: (1) bias kerusuhan antar agama di Ambon, (2) konflik antar batas 11 desa di Kao dan Jailolo berdasarkan PP. No. 42/1999, (3) Konflik status Provinsi, dan (4) persaingan suksesi lokal. Ia kemudian menjelaskan bahwa persaingan elit politik Jakarta turut memperparah konflik-konflik di daerah (Ruray, 2000: 8). Pada awalnya konflik Islam dan Kristen terjadi di Ambon, Maluku pada Januari 1999 Maluku kemudian menyebar ke Maluku Utara.

Kerusuhan di Kao dan Malifut sebagai akibat dari pembentukan kecamatan Makian Malifut. Kerusuhan yang meletus pada tanggal 18 Agustus 1999 itu ternyata menggagalkan pembentukan kecamatan tersebut. Dalam konflik yang terjadi dalam bulan Oktober korban terutama diderita oleh orang Makian sehingga sekitar 16.000 orang dari 16 desa terpaksa mengungsi ke Ternate dan Tidore dimana mereka memanasakan situasi sehingga di kedua tempat itu terjadi kekerasan terhadap orang Kristen yang terpaksa mengungsi ke Minahasa (Tomagola, 2000).

Konflik yang terjadi di Halmahera Utara khususnya antara masyarakat Kao dan Malifut berawal dari penyerangan warga Malifut yang Muslim ke warga Kao yang Kristen, pada Rabu 18 Agustus 1999 ketika rumah warga Kristen dilakukan pengrusakan dan pembakaran oleh warga Malifut. Sehingga pembalasan penyerangan dari warga Kao Kristen juga dilakukan ketika bala bantuan datang dari tetangga desa (Totona, 2014: 122). Penyerangan pun mulai terjadi baik itu penyerangan terhadap orang-orang Makian maupun Kao. Selama kurang lebih 24 tahun berada di Malifut, status wilayah mereka terkatung-katung. Sebelum akhir petaka 24 Agustus 1999, sering terjadi perkelahian antar pemuda dari kedua suku yang berbeda agama tersebut, disamping

pembabatan hasil-hasil kebun milik warga Makian Malifut oleh suku asli Kao terhadap keberhasilan ekonomi penduduk pendatang ini (Bujang, 2000: 121).

Dua bulan kemudian Propinsi Maluku Utara benar-benar menjadi fakta resmi yang menuntut pelaksanaan secepatnya. Malifut merupakan bagian dari rangkaian implementasi tersebut. Pada Minggu sore tanggal 24 Oktober para pejuang Kao yang dipimpin oleh seorang pria bernama Benny Bitjara menyerang balik setelah pagi harinya diancam oleh orang Makian karena melanggar batas wilayah. Tiap rumah Makian di wilayah itu di bakar habis. Seluruh penduduk Makian yang berjumlah 17.000 orang mengungsi ke barat menyeberang selat menuju Ternate dan Tidore. Ini merupakan kemenangan putaran pertama bagi Sultan Mudaffar (Klinken, 2007: 199). Betapa sulitnya kehidupan masa itu, kecurigaan dari masyarakat yang berbeda etnis dan agama semakin kuat. Perasaan curiga tersebut juga merupakan salah satu 'penyakit' pemicu konflik. Faktor lain adalah peran provokator dari masing-masing etnis maupun agama yang membuat suasana semakin 'panas'.

Berita-berita mengenai di sekitar Tobelo pada tanggal 26 Desember dengan cepat mencapai Ternate. Orang-orang Muslim di Galela, barat Tobelo, telah mengontrak kelompok-kelompok Islam di Ternate Selatan. Rasa berang kepada para pengikut setia sultan Ternate tumbuh diantara berbagai koalisi Islam, yang saat itu dikenal dengan orang-orang putih, tepatnya sejak November sebelumnya. Militer, sebagaimana kita lihat, dengan tidak bertanggungjawab meminta para preman sultan membantu "mengamankan" kota Ternate dari kekacauan (Klinken, 2007: 202). Saat konflik terbuka di Tobelo, dimana warga Muslim saling berhadapan dengan warga Kristen, pada saat yang sama tanggal 27 Desember 1999 di Ternate juga muncul konflik berdarah. Di Tobelo warga Muslim dan Kristen saling berhadapan, di Ternate pertikaian berdarah

antara warga "Muslim Putih" dan dan warga Muslim dari dewan adat atau "Muslim Kuning". Saat rasa *ukhuwah* dan rasa persaudaraan Muslim timbul untuk membantu sesama warga Muslim di Tobelo dan Galela, pertikaian di Ternate antara "putih" dan "kuning" mencuat, menghambat langkah sesama warga Muslim untuk membantu saudara-saudaranya (Ahmad dan Oesman, 2000: xx-xxi).

Yang paling mengejutkan polisi dan militer, wakil Kuning mereka tampil dengan sangat buruk ketika pertempuran pecah di Ternate pada tanggal 26 Desember 1999. Pada tanggal 28 permusuhan itu pun memuncak menjadi skala peperangan yang sungguh mengerikan. Pihak Kuning bisa dipaksa mundur dari kekuasaan mereka di wilayah perkampungan Tanah Tinggi dan Kampung Pisang dan mundur hingga ke utara. Keesokan harinya peperangan pecah sehari penuh, dengan korban meninggal 29 orang dan yang terluka parah 39 orang. Klinken mengutip Bubandt, siang harinya pasukan kuning akhirnya mundur ke istana sultan, sultan sendiri tampaknya dipaksa melepas dan membakar pakaian kebesarannya sebelum diperbolehkan mengungsi ke Sulawesi Utara (lihat Klinken, 2007: 202-203).

Pendapat mengenai adanya upaya mengenai isu Kristenisasi mencuat di masyarakat, khususnya kaum Muslim bahwa setelah warga Muslim Makian dirangsek keluar dari Malifut oleh mayoritas kristen di Kao, maka wilayah Halmahera Utara akan dijadikan pusat Kristenisasi di Maluku Utara. Pendapat ini menguat di masyarakat luas ketika dokumen yang memuat skenario pembantaian suku Makian Malifut yang Islam berjudul "Sosol Berdarah". Ketika pertikaian tanggal 6 Nopember 1999 di Ternate ditemukan beberapa lembar surat di desa Kayu Merah dan Ubo-Ubo Ternate di dalam rumah keluarga Kristen tentang upaya Kristenisasi Maluku Utara. Lembaran surat dan dokumen gelap "Sosol

Berdarah” tersebut beredar luas dalam bentuk copyan (Bujang, 2000: 120).

Setelah penyerangan terhadap orang-orang Kristen di Ternate pada tanggal 6 November, para komandan polisi dan militer di Ternate menyuruh sultan “mengerahkan orang-orangnya”. Para pemuda yang kasar dari luar kota telah menghentikan lalu lintas dan dengan agresif memaksa orang-orang menunjukkan identitas mereka. Berita-berita bahwa orang-orang merah Kristen, yang dianggap sebagai mitra sultan (yang warnanya Kuning), telah menyerang orang-orang Muslim Tobelo kemudian berbalik membuat kaum Putih bergerak melawan sultan. Koalisi kaum putih semakin menggalang para anggotanya dari masjid-masjid di selatan Ternate (Toboko dan Mangga Dua) dan dari desa-desa di Tidore yang dikenal ganas. Komandan mereka adalah Abubakar Wahid, seorang pensiunan pejabat Departmen Pendidikan dan Kebudayaan dari Tidore (Klinken, 2007: 202).

Konflik yang terjadi di Maluku Utara dari Agustus 1999 telah menelan banyak korban nyawa dan harta menurut *Violent Conflict in Indonesia Study* bahwa korban jiwa akibat konflik di Maluku Utara dalam waktu sebelas bulan mulai dari awal Agustus 1999 sampai Juni 2000, tercatat 3.257 orang tewas dan 2.635 orang luka-luka. Ironisnya korban yang berjatuh adalah perempuan dan anak-anak yang tidak bersalah (Totona, 2014: 81).

Tomagola juga menunding persaingan antara sultan Ternate dan sultan Tidore sebagai sebab sebagian kekerasan itu. Sultan Ternate, yang menarik dukungan antara lain dari orang-orang Kristen di Halmahera Utara, sudah lama merupakan saingan sultan Tidore yang basis dukungannya lebih besar dari kalangan Muslim di Halmahera Tengah dan Selatan. Ketika pemerintah Habibie memutuskan untuk sebuah provinsi baru di Maluku Utara, sultan Ternate turut bersaing untuk jabatan gubernur,

sementara seorang sekutu sultan Tidore, Bahar Andili, seorang birokrat karir, juga maju sebagai calon. Tomagola melihat kekerasan yang terjadi adalah akibat dari kompetisi untuk mendapatkan jabatan gubernur, serta faktor destabilisasi Malifut. Kemudian kekerasan itu juga disebabkan oleh eksploitasi Australia atas tambang emas setempat, yang hasil-hasilnya sangat diperebutkan oleh orang-orang Kristen dan Muslim yang bersekutu dengan kedua sultan tadi (Bertrand, 2012: 210). Konflik di Maluku Utara 1999-2000 adalah bagian dari perebutan kekuasaan antar elit lokal, bias dari konflik agama Islam dan Kristen di Ambon, pembentukan kecamatan baru Makian Malifut berdasarkan PP. No. 42/1999, hingga menimbulkan konflik etnis dan agama.

Penutup

Konflik Ambon, Maluku terjadi sejak tanggal 19 Januari 1999 bertepatan dengan umat Islam merayakan Hari Raya Idul Fitri 1419 Hijriah. Konflik bermula pertikaian antara seorang sopir angkot yang bernama Jacob Lauhery sering dipanggil Yopi dengan seorang pemuda Muslim keturunan Bugis yang beragama Islam di Batu merah. Peristiwa tersebut kemudian berkembang menjadi konflik agama (Islam dan Kristen) di Ambon, Maluku dan sekitarnya. Konflik dan kekerasan yang terjadi sejak Januari 1999, menimbulkan banyak korban jiwa dan harta benda. Banyak warga kehilangan tempat tinggal dan sebagian warga mengungsi hingga di Sulawesi. Tempat-tempat ibadah baik umat Islam maupun Kristen rusak/terbakar.

Di Maluku Utara konflik dan kekerasan pun terjadi. Perebutan kekuasaan di tingkat lokal antara sultan Ternate yang didukung oleh dewan adat dengan kubu menentang sultan Ternate (Sultan Tidore, Bahar Andili, Syamsir Andili, Thaib Armayn dan dukungan dari masyarakat Maluku Utara) telah menimbulkan perpecahan pada masyarakat baik itu etnis maupun agama (Islam dan Kristen). Pembentukan kecamatan baru Makian Malifut berdasarkan PP.

No.42/1999 mendapat penolakan dari penduduk Kao karena di anggap melanggar adat. Konflik mulai terjadi antara orang Kao dengan orang Makian sebagai suku pendatang dari Pulau Makian karena ancaman gunung api (Gunung Kie Besi, Makian). Peristiwa tersebut kemudian menyebar ke Tidore, Ternate, Jailolo, dan Bacan. Konflik Maluku Utara adalah peristiwa berdarah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Konflik yang terjadi sejak Agustus 1999 hingga Juni 2000 di Maluku Utara menelan korban jiwa, rumah dan tempat ibadah (Masjid dan Gereja) rusak/terbakar. Kebanyakan korban dari peristiwa tersebut adalah perempuan dan anak-anak yang tidak berdosa.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu terlaksananya penelitian ini. Tak lupa, penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada dewan redaksi Jurnal Istorica terbitan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta atas kesempatan yang diberikan sehingga tulisan ini dapat dipublikasikan pada edisi Maret 2017.

Daftar Pustaka

- Abdulrahman, Jusuf. 2002. *Kesultanan Ternate dalam Jou Ngon Ka Dada Madopo Fangare Ngom Ka Alam Madiki*. Manado: Media Pustaka.
- Andrianto, Tuhana Taufiq. 2000. *Konflik Maluku*. Yogyakarta: Gama Global Media.
- Bertrand, Jacques. 2012. *Nasionalisme dan Konflik Etnis di Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.
- Bujang, Agus Salim. 2000. *Keragaman Budaya dan Konflik di Halmahera Utara* dalam Ahmad, Kasaman H dan Oesman, Herman (*penyunting*). *Damai Yang Terkoyak, Catatan Kelam dari Bumi Halmahera*. Ternate: Kelompok Studi PODIUM, LPAM Pemuda Muhammadiyah Maluku Utara dan Madani Press.
- Klinken, Gerry van. 2007. *Perang Kota Kecil, Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia*. Jakarta: KITLV-Jakarta dan Yayasan Obor Indonesia.
- Kuntowijoyo. 2013. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: TiaraWacana.
- Leirissa, RZ. 2001. *Kerusuhan Komunal di Provinsi Maluku* dalam Kumpulan Makalah Diskusi Sejarah Lokal, sub tema *Konflik Komunal dan Ketersingkirian Sosial (penyunting)* Andi Syamsu Rijal SS. Jakarta: Proyek Peningkatan Kesadaran Sejarah Nasional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan Nasional.
- Gottschalk, Louis. 1985. *Mengerti Sejarah*, (penerjemah) Nugroho Noto Susanto. Jakarta: UI Press.
- Erman, Erwiza (pengantar) dalam Nordholt, Henk Schulte 2002. *Kriminalitas Modernitas dan Identitas dalam Sejarah Indonesia*. (Pengantar) Erwiza Erman, Peneliti pada Pusat Studi Sumberdaya Regional, LIPI. Yogyakarta: Pustaka Pelajara.
- Nur, Abubakar Muhammad. 2009. *Merajut Damai di Maluku Utara (Telaah Konstruksi Konflik Malifut 1999-2000)*. Ternate: Ummu Press.
- Ruray, Syaiful Bahri. *Tragedi Halmahera: Antara Bosnia dan Papolo* dalam Ahmad, Kasaman H dan Oesman, Herman (*penyunting*). *Damai Yang Terkoyak, Catatan Kelam dari Bumi Halmahera*. Ternate: Kelompok Studi PODIUM, LPAM Pemuda Muhammadiyah Maluku Utara dan Madani Press.
- Suaedy, Ahmad dkk. 2000. *Luka Maluku: Militer Terlibat*. Yogyakarta: Institut Studi Arus Informasi.
- Tomagola, Tamrin Amal. *The Bleeding Halmahera of North Moluccas*, naskah untuk Workshop on Political Violence in Asia, Centre for Development and Environment, University of Oslo, 5-7 June 2000.

- Totona, Abdullah. 2014. *Kaum Intelektual dan Ambiguitas: Kajian Mengenai Peran dan Posisi Kaum Intelektual pada Konflik Maluku Utara 1999-2000*. Program Magister Ilmu Religi dan Budaya Universitas Sanata Dharma. Tesis. Tidak Diterbitkan. Di undu dalam https://repository.usd.ac.id/2013/2/116322017_full.pdf
- Trijono, Lambang. 2001. *Keluar dari Kemelut Maluku, Refleksi Pengalaman Praktis Bekerja Untuk Perdamaian Maluku*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Waileruny, Samuel. 2010. *Membongkar Konspirasi di Balik Konflik Maluku*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia